

MASALAH-MASALAH KEAMANAN ASIA TENGGARA MENURUT SUATU PANDANGAN JEPANG*

NEGARA-NEGARA BESAR DAN ASIA TENGGARA

Keamanan Asia Tenggara banyak dipengaruhi oleh hubungan-hubungan kompleks antara ketiga negara besar - Uni Soviet, RRC dan Amerika Serikat - dan bagian dunia ini. Ketiga negara besar ini telah menempatkan angkatan bersenjata mereka yang kuat di kawasan ini dan sekitarnya. Uni Soviet terus memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada Vietnam dan bagian Angkatan Laut dan Angkatan Udara-nya menggunakan pangkalan-pangkalan militer di Vietnam. RRC telah menempatkan sebagian besar Angkatan Darat-nya di perbatasan Vietnam dan Laos. Amerika Serikat mengoperasikan Armada VII-nya di perairan sekitarnya, menempatkan skuadron-skuadron Angkatan Udara taktisnya dan mempunyai suatu pangkalan laut di Pilipina.

Persoalan sulit yang kini terdapat di Asia Tenggara adalah Kampuchea di mana pertempuran berlangsung terus. Vietnam adalah sebuah negara yang lebih kecil daripada ketiga negara tersebut, tetapi kemampuan militernya besar sekali dan tingkah lakunya yang ambisius dan ekspansionis merupakan suatu ancaman bagi negara-negara lain di kawasan. Vietnam kini memang mempunyai dampak yang lebih besar atas kawasan ini daripada salah satu dari ketiga negara itu.

Pola politik yang kini terdapat di Asia Tenggara, kecuali Birma, adalah suatu pertentangan antara ASEAN dan Indocina, atau dengan kata lain, antara demokrasi dan sosialisme. ASEAN sangat pro Barat. Baik Pilipina maupun Muangthai bersatu dengan Amerika Serikat, yang pertama lewat suatu perjanjian pertahanan bersama dan yang kedua sebagai anggota

* Diambil dari makalah Naotoshi SAKONJO, "Security Problems in Southeast Asia. A Japanese View," pada Kolokuium Jepang-Indonesia yang ke-9, Surabaya, 20-22 Agustus 1981, oleh Kirdi DIPOYUDO. Naotoshi SAKONJO adalah dari surat kabar *Sankei*.

SEATO. Malaysia dan Singapura bersatu dengan Inggris, Australia dan Selandia Baru berdasarkan suatu persetujuan pertahanan. Indonesia dekat dengan Barat sistem politik dan ekonominya, tetapi menganut suatu politik Non-Blok. Dalam kenyataan Indonesia erat terjalin dengan Barat secara politik maupun ekonomi.

Sejak invasi Vietnam ke Kampuchea bulan Desember 1978, bangsa-bangsa ASEAN secara unanimitas menuntut penarikan mundur pasukan-pasukan Vietnam dari Kampuchea. Akan tetapi mereka tidak unanimitas dalam persepsi mereka mengenai Uni Soviet yang secara terus menerus membantu Vietnam dan mengenai Cina yang bulan Pebruari dan Maret 1979 menyerbu Vietnam. Muangthai, Filipina dan Singapura rupanya menganggap Uni Soviet sebagai ancaman yang lebih besar daripada Cina, sedangkan Malaysia dan Indonesia melihat Cina sebagai ancaman yang lebih besar daripada Uni Soviet. Perbedaan persepsi mengenai kedua negara sosialis yang besar itu meningkatkan kerumitan soal keamanan di Asia Tenggara.

Filipina tidak melihat Cina sebagai ancaman karena merupakan suatu negara pulau dan oleh sebab Amerika Serikat dengan mana ia sejak lama erat terjalin di segala bidang telah menjalin hubungan erat dengan Cina. Filipina lebih cemas dengan build-up Armada Pasifik Soviet dan meningkatnya kegiatannya di Pasifik Barat. Muangthai mempunyai hubungan erat dengan Amerika Serikat dan menuntut suatu hubungan persahabatan dengan Cina untuk menghadapi Vietnam karena Amerika Serikat cenderung untuk melepaskan diri dari Asia. Ketika Muangthai menjadi bersahabat dengan Cina, Vietnam mengambil sikap bermusuhan terhadap Muangthai. Khususnya Vietnam marah bahwa Muangthai menjadi suatu tempat perlindungan bagi pasukan-pasukan Pol Pot dan bulan Juni 1980 pasukan-pasukan Vietnam melintasi perbatasan untuk menyerang pasukan-pasukan Muangthai.

Malaysia berhati-hati terhadap Cina karena hampir 40% penduduknya adalah keturunan Cina dan oleh sebab gerilyawan-gerilyawan komunis aktif di perbatasan Muangthai. Malaysia agak gelisah dengan pengungsi-pengungsi Vietnam yang kebanyakan keturunan Cina dan dikejutkan oleh pasukan-pasukan Vietnam yang melintasi perbatasan untuk menyerang pasukan-pasukan Muangthai seperti tersebut di atas.

Dengan alasan yang sama Singapura berhati-hati terhadap Cina karena tiga perempat penduduknya adalah keturunan Cina. Seperti Indonesia, Singapura belum menjalin hubungan diplomatik dengan RRC. Akan tetapi dari segi militer Singapura menganggap Uni Soviet sebagai ancaman yang lebih besar dan banyak memikirkannya untuk melindungi jalur-jalur laut lewat Selat Malaka.

Di Indonesia PKI yang bertanggung jawab atas Gestapu (Gerakan 30 September) jelas didukung oleh RRC. Sebagai akibatnya baik Pemerintah maupun Angkatan Bersenjata Indonesia sangat berhati-hati terhadap orang-orang Cina. Pedagang-pedagang Cina merupakan kurang dari 3% penduduk Indonesia, tetapi kekuatan ekonomi mereka besar. Indonesia juga curiga terhadap tidak menentunya kebijaksanaan Cina mengenai kebangsaan pedagang-pedagang Cina di Indonesia. Akan tetapi Indonesia tidak merasa diancam oleh RRC secara militer.

1. Uni Soviet

Uni Soviet menjadi sangat terlibat dalam urusan Asia Tenggara dalam peperangan di Vietnam. Bantuan Uni Soviet sangat besar peranannya dalam kemenangan Vietnam.

Uni Soviet mengadakan suatu perjanjian persahabatan dan kerja sama dengan Vietnam pada bulan Nopember 1978. Pada waktu itu posisi Uni Soviet di Asia memburuk akibat pendekatan Amerika Serikat-RRC dan diadakannya suatu perjanjian perdamaian dan persahabatan antara Jepang dan Cina (Agustus 1978). Akan tetapi perjanjian dengan Vietnam memberikan seorang sekutu di Asia Tenggara kepada Uni Soviet untuk pertama kalinya dan secara demikian ia mampu mengerahkan kekuatan militer bila perlu dan secara sah karena hal itu mestinya akan dilakukan atas permintaan Vietnam. Invasi Vietnam ke Kampuchea yang berlangsung bulan berikutnya meningkatkan permusuhan yang telah ada antara Cina dan Vietnam. Karena jelas bahwa Uni Soviet mendukung Vietnam sepenuhnya, maka bukan saja negara-negara Barat tetapi juga negara-negara ASEAN dengan keras mengutuk Vietnam dan menjadi semakin berhati-hati terhadap Uni Soviet. Sudah barang tentu usaha Uni Soviet untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat dan meningkatkan pengaruhnya sendiri mengalami kemacetan.

Invasi Cina ke Vietnam bulan Pebruari 1979 memberikan kesempatan kepada Uni Soviet untuk kadang-kadang menggunakan pangkalan udara di Da Nang dan pangkalan laut di Cam Ranh Bay. Kesempatan itu pasti disambut dengan gembira oleh Uni Soviet.

Sebagai akibat invasi Uni Soviet ke Afghanistan bulan Desember 1979, sikap ASEAN dan banyak negara lain di dunia menjadi semakin buruk terhadap Uni Soviet. Dilaporkan bahwa bantuan Uni Soviet untuk Vietnam mencapai jumlah US\$ 1 milyar setahun, tetapi rupanya terjadi sedikit gesekan dalam hubungan mereka. Uni Soviet sudah barang tentu meng-

inginkan Indocina menjadi sosialis, tetapi pada waktu yang sama juga ingin mempunyai pengaruh yang langsung atas Kampuchea dan Laos. Di lain pihak Vietnam praktis menguasai seluruh Indocina dan rupanya akan berurusan dengan Uni Soviet sebagai wakil Indocina.

Bertahun-tahun Vietnam berperang melawan Perancis dan kemudian melawan Amerika Serikat sesudah Perang Dunia II dan akhirnya berhasil menyatukan Vietnam Selatan dan Utara. Orang-orang Vietnam mempunyai perasaan kemerdekaan dan harga diri yang kuat dan bersifat eksklusif. Berbeda dengan negara-negara Eropa Timur dan Afghanistan, Vietnam jauh dari Uni Soviet. Bantuan Uni Soviet jelas diperlukan Vietnam, tetapi orang-orang Vietnam tidak akan mengijinkan pengaruh dan campur tangan Uni Soviet melampaui batas-batas tertentu. Pangkalan-pangkalan laut dan udara Vietnam tersebut rupanya tidak menjadi pangkalan-pangkalan Uni Soviet.

Terlepas dari masalah-masalah dalam negeri mereka, orang-orang Soviet sibuk dengan Afghanistan dan Polandia. Diperkirakan bahwa politik Uni Soviet di Asia akan tetap kalah penting dibandingkan dengan politiknya di Timur Tengah dan Eropa.

2. Republik Rakyat Cina

RRC telah menjadi bermusuhan dengan Uni Soviet yang merupakan sekutunya pada dasawarsa 1950-an, dan melawan Vietnam yang merupakan sahabatnya selama perang Vietnam. Cina tidak akan mengijinkan dominasi Vietnam atas Indocina. Jelaslah bahwa salah satu sebabnya ialah karena Uni Soviet di belakang Vietnam.

Invasi Cina ke Vietnam gagal mencapai hasil-hasil yang diharapkan. Sebagian ini adalah akibat kenyataan bahwa Cina, mungkin karena takut akan Uni Soviet, memberitahukan lama, skala dan medan operasi-operasi kepada Vietnam bertentangan dengan akal sehat militer. Bagaimanapun, kegagalan Cina mencapai kemenangan telah memperkuat percaya diri Vietnam. Tidak diragukan bahwa Cina sangat merasa perlunya modernisasi angkatan bersenjata. Vietnam di lain pihak menderita secara ekonomi dan terpaksa menggunakan pasukan-pasukan cadangan. Bahkan sekarang Vietnam terpaksa mempertahankan dua pertiga pasukannya di perbatasan Cina-Vietnam. Namun Cina tidak mampu mengurangi tekanan Vietnam terhadap Kampuchea. Lebih buruk lagi, sebagai akibat tindakan Cina itu telah meningkat pengaruh Uni Soviet atas Vietnam, termasuk penggunaan pangkalan-pangkalan militer di Vietnam.

RRC terus mendukung pasukan-pasukan Pol Pot yang buruk reputasi internasionalnya karena mereka ini merupakan satu-satunya kelompok bersenjata yang mampu melawan pasukan-pasukan Vietnam sampai batas-batas tertentu. Orang-orang Cina mengambil sikap yang kaku dalam konperensi internasional mengenai persoalan Kampuchea yang diadakan bulan Juli tahun ini, tetapi kemungkinan besar mereka mempersoalkan kemungkinan pasukan-pasukan Pol Pot merebut kembali Kampuchea. Diperkirakan bahwa Cina menginginkan agar pasukan-pasukan Pol Pot selama mungkin bertempur melawan pasukan-pasukan Vietnam sehingga sementara itu mereka dapat menemukan suatu tindakan balasan. Cina akan terus bermusuhan dengan Vietnam di satu pihak dan di lain pihak akan berusaha menjalin hubungan baik dengan ASEAN dan membujuknya untuk mempertahankan suatu sikap anti Vietnam.

3. Amerika Serikat

Amerika Serikat mengeluarkan US\$ 150 milyar untuk perang di Vietnam dan menderita 50.000 orang tewas dan 300.000 orang cedera, akan tetapi dikalahkan oleh Vietnam Utara. Dengan meningkatnya intervensi Amerika Serikat, sikap anti perang dan anti militer menjadi semakin kuat dalam Kongres dan di kalangan rakyat, dan memaksa suatu pengurangan atau penundaan build-up militer melawan Uni Soviet yang diperjuangkan oleh pemerintah. Doktrin Guam tahun 1969 dan Doktrin Nixon tahun 1970 mengemukakan negara-negara anti komunis di Asia karena menunjukkan suatu arah menuju penarikan mundur Amerika Serikat dari Asia, dan sebagai akibatnya kepercayaan mereka akan Amerika Serikat menurun. Dengan berakhirnya perang Vietnam terjadi suatu pengurangan kekuatan Armada VII secara besar-besaran dan pengosongan suatu pangkalan udara Amerika Serikat di Muangthai. Tidak dapat disangkal bahwa pendekatan Amerika Serikat-Cina dan pembatalan perjanjian Amerika Serikat-Cina Nasionalis mempunyai pengaruh negatif atas sikap negara-negara ASEAN terhadap Amerika Serikat.

Campur tangan Uni Soviet dalam urusan sementara negara Dunia Ketiga pada bagian kedua dasawarsa 1970-an dan meningkatnya pengaruh Uni Soviet akibatnya menimbulkan keprihatinan dan kecemasan di kalangan negara-negara Barat. Amerika Serikat telah sembuh dari sindrome Vietnam dan meneruskan build-up militernya pada tahun 1978. Ronald Reagan bulan Januari 1981 menjadi Presiden dengan dukungan mayoritas rakyat. Dengan maksud untuk kembali ke suatu Amerika yang kuat dan mengakui bahwa Uni Soviet telah memperoleh suatu kedudukan keunggulan militer atas Amerika Serikat, Presiden Reagan segera mulai melaksanakan suatu tugas untuk

dengan cepat membangun kekuatan militer dan mengumumkan maksudnya untuk dengan tegas membendung intervensi Uni Soviet di Dunia Ketiga. Salah satu tujuan prioritasnya ialah perbaikan kekuatan nuklir strategis, termasuk rudal MX, kapal selam Trident dan jenis-jenis pembom maju yang pengembangannya ditunda atau dihentikan sebagai akibat perang Vietnam. Dengan demikian Amerika Serikat berusaha untuk kembali ke posisi polisi Barat. Amerika Serikat jelas merupakan polisi yang paling kuat di dunia, biarpun tidak melakukan tugas itu secara sendirian seperti dalam Perang Dingin.

Adalah wajar bahwa Amerika Serikat agak negatif dalam normalisasi hubungan dengan Vietnam yang merupakan lawannya dalam perang Vietnam. Selain itu kecurigaan Amerika Serikat menjadi lebih mendalam selama perundingan-perundingan perdamaian. Sedangkan sementara orang Amerika mendukung normalisasi hubungan dengan Vietnam, invasi Vietnam ke Kam-puchea membungkam suara-suara itu. Muangthai sebagai tetangga Kam-puchea takut bahwa Vietnam ganti menyerbu wilayahnya dan minta bantuan Amerika Serikat. Washington menanggapi dengan memberinya sejumlah tank jenis tua dan amunisi sambil berjanji akan membantu Muangthai bila diserbu Vietnam. Namun, bahkan kalau Vietnam menyerbu Muangthai - kemungkinannya sangat kecil - Amerika Serikat sulit mengadakan suatu intervensi militer langsung untuk mengulangi kebodohan perang Vietnam. Bahkan diragukan bahwa Amerika Serikat akan menggunakan Angkatan Laut dan Angkatan Udara, jangankan Angkatan Darat. Kalau Amerika Serikat berperang lagi melawan Vietnam, tidak tertutup kemungkinan bahwa akan terjadi konfrontasi langsung dengan Uni Soviet.

Konflik-konflik yang masih berlangsung terus di Indocina menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak lagi mampu turun tangan dalam perselisihan-perselisihan di kawasan. Sejauh ini Amerika Serikat hanya mampu mencaci maki Vietnam dan Uni Soviet di PBB dan lain-lain konperensi internasional.

Pemerintah Reagan kiranya akan berusaha memainkan peranan yang lebih besar untuk membendung meluasnya pengaruh Uni Soviet di Asia Tenggara. Akan tetapi negara-negara ASEAN tidak mesti setuju dalam pandangan mereka mengenai Amerika Serikat. Beberapa mungkin kurang senang dengan penjualan senjata Amerika Serikat kepada RRC. Jenis kebijaksanaan apa dalam kenyataan akan dapat dianut Amerika Serikat di Asia Tenggara? Apakah kebijaksanaan Reagan untuk menentukan tingkat bantuan dalam proporsi dengan tingkat persahabatan dengan Amerika Serikat akan diterapkan pada ASEAN? Jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bergantung pada perkembangan lebih lanjut.

PERSOALAN KAMPUCHEA

ASEAN yang berhasil mencapai kemajuan ekonomi lewat kerja sama bersama menghadapi persoalan Kampuchea dan secara demikian menunjukkan kejayaan politiknya. Sekalipun persepsi mereka mengenai Uni Soviet dan RRC berbeda, seperti disebutkan di atas, mereka bersatu mendekati persoalan Kampuchea. Sikap mereka itu pantas mendapat pujian yang tinggi.

Negara-negara ASEAN, khususnya Muangthai, menginginkan suatu Kampuchea yang netral. Akan tetapi prospeknya tidaklah begitu baik. Tidak banyak harapan bahwa akan muncul suatu kekuatan ketiga - di samping rezim Heng Samrin dan rezim Pol Pot (Kampuchea Demokratis). Sihanouk, yang suatu saat dianggap penuh harapan, rupanya telah kehilangan kepercayaan umum karena sering mengubah sikapnya.

Vietnam kiranya tidak akan menarik mundur pasukannya dari Kampuchea atau menyetujui penempatan pasukan perdamaian PBB atau suatu pemilihan yang diadakan di bawah pengawasan PBB. Sementara orang mengatakan bahwa Vietnam mungkin menyetujui penarikan pasukan atau pemilihan sebagai formalitas, tetapi Vietnam rupanya kurang ditekan sehingga minta suatu konsesi pada tahap ini. Dari sudut pandangan Vietnam, rezim Heng Samrin adalah wakil sah rakyat Kampuchea dan suatu pemilihan umum tidak diperlukan.

Karena dialog antara Amerika Serikat dan Uni Soviet belum dimulai, tidaklah mungkin bagi Amerika Serikat untuk meyakinkan Uni Soviet agar memperlunak sikap Vietnam. Bahkan kalau Uni Soviet mengabulkan permintaan Amerika Serikat, tidak besarlah kemungkinan bahwa Vietnam akan mengikuti nasihat Uni Soviet.

Di Kampuchea banyak pejabat pemerintah dibunuh dan perwira-perwira Vietnam menjalankan tugas pemerintahan. Dilaporkan bahwa rakyat lebih ramah terhadap pasukan-pasukan Vietnam daripada terhadap pasukan-pasukan Pol Pot. Rezim Heng Samrin memang boneka Vietnam, tetapi boleh jadi juga benar bahwa rezim ini memenangkan hati rakyat Kampuchea. Jika demikian halnya, maka dapat disimpulkan bahwa persoalan Kampuchea mendapat segi yang berlainan dengan persoalan Afghanistan.

Andaikata terbentuk suatu "Federasi Indocina" di bawah pimpinan Vietnam, Vietnam akan berusaha memperluas wilayahnya? Dengan kata-kata lain, akan berkembangkah suatu situasi untuk membenarkan teori domino? Tidak akan ada kemungkinan serupa itu paling tidak sampai Vietnam pulih kembali sepenuhnya dari kesulitan ekonominya sekarang ini. Kalau Barat dan

ASEAN memberikan bantuan ekonomi kepada Vietnam sebagai pengakuan atas suatu *fait accompli*, bagaimana hal itu akan mempengaruhi tingkah laku Vietnam? Sulit membuat suatu ramalan. Masalahnya mirip dengan soal apakah hasil jangka panjang bantuan ekonomi Barat untuk Uni Soviet, khususnya dalam pengembangan Siberia? Dengan sejarah pertempuran selama 30 tahun sesudah Perang Dunia II, Vietnam mungkin lebih hebat daripada Uni Soviet.

ANCAMAN MILITER UNI SOVIET DAN CINA

ASEAN mengharapkan munculnya suatu Asia Tenggara yang damai dan mantab, bebas dari tekanan politik dan militer dari ketiga negara besar dan bebas dari keterlibatan dalam pertarungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet maupun antara Cina dan Uni Soviet. Tetapi dalam kenyataan ASEAN tidaklah bebas dari hubungan dengan ketiga negara itu dan dengan Vietnam. Tiada negara yang dapat mengabaikan apa yang dimiliki ASEAN - posisi strategis, sumber-sumber daya dan kekuatan ekonomi yang meningkat.

Ancaman militer macam apa datang dari Uni Soviet? Karena Uni Soviet dan Vietnam terpisah oleh jarak lebih dari 2.000 km, hampir tak terbayangkan bahwa pasukan-pasukan Uni Soviet akan menyerbu negara-negara ASEAN lewat Vietnam. Sumber kecemasan ialah kemungkinan-kemungkinan gerak Angkatan Laut dan Angkatan Udara Uni Soviet yang beroperasi dari pangkalan-pangkalan di Vietnam. Pangkalan udara di Da Nang akan memungkinkan perluasan lingkup kegiatan Angkatan Udara Uni Soviet dan pangkalan laut di Cam Ranh akan memungkinkan kegiatan-kegiatan yang berani bagi kapal-kapal selam dan permukaan Uni Soviet. Kehadiran satuan-satuan Angkatan Laut Uni Soviet di Asia Tenggara telah melakukan tekanan psikologis atas ASEAN (pesawat intai Angkatan Laut Uni Soviet sering terbang ke Da Nang dari Propinsi Maritim).

Angkatan Laut Uni Soviet masa damai harus dibedakan dengan Angkatan Laut Uni Soviet masa perang. Seperti dikatakan lebih dahulu, Da Nang dan Cam Ranh rupanya belum menjadi pangkalan-pangkalan militer Uni Soviet. Kalau Uni Soviet ingin menjadikan tempat-tempat ini pangkalan-pangkalan kunci untuk digunakan pada masa perang, tempat-tempat itu harus dilengkapi dengan sistem-sistem peringatan awal pertahanan udara, pesawat-pesawat penyergap dan rudal-rudal darat-ke-udara, dan perlu dibangun fasilitas-fasilitas perawatan dan reparasi untuk pesawat dan kapal, dan persediaan bahan bakar, amunisi dan suku cadang yang besar. Tetapi bahkan kalau build-up serupa itu dilakukan, Vietnam, seperti Kampuchea, merupakan suatu pulau terpencil di daratan, sehingga sangat sulit untuk mengirimkan

suplai dari Uni Soviet pada masa perang. Kalau pecah perang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, Amerika Serikat akan mampu menghancurkan kemampuan fungsional pangkalan-pangkalan musuh dalam waktu dekat dengan menggunakan pesawat-pesawat dari kapal-kapal induk dan pembom B-52 dan dengan operasi-operasi peranjau. Pendek kata, pangkalan-pangkalan Vietnam bisa bermanfaat untuk kehadiran militer Uni Soviet dalam waktu damai dan campur tangannya di Asia Tenggara, tetapi bukan ancaman serius dalam waktu perang.

Perlindungan Selat Malaka merupakan suatu tugas yang sulit. Kapal-kapal selam Uni Soviet bukan saja dapat menyerang kapal-kapal yang melewati selat itu tetapi juga memasang ranjau. Diperlukan kapal-kapal perang anti kapal selam (ASW) 1.000 ton ke atas untuk mencari, menemukan dan menyerang suatu kapal selam, tetapi sekarang ini Indonesia, Malaysia dan Singapura hanya mempunyai kemampuan perang anti kapal selam yang terbatas dan tidak mempunyai kemampuan perang anti ranjau. Kalau negara-negara ini dapat meningkatkan kemampuan serupa itu, daya tangkal mereka terhadap Uni Soviet akan menjadi lebih besar, akan tetapi dengan premis bahwa mereka mempunyai kemauan untuk bertempur melawan Uni Soviet, bila pecah perang Amerika Serikat-Uni Soviet, sebagai anggota blok Barat atau dalam kerja sama dengan blok Barat. Dari ketiga negara ini Indonesia mempunyai kekuatan laut yang potensial dengan kemampuan hebat, tetapi Indonesia dewasa ini menganut politik Non-Blok. Kalau Indonesia tidak bersedia untuk berperang di pihak Barat, ASEAN tidak akan mampu memberikan sumbangan yang berarti untuk melindungi Selat Malaka.

Cina berbatasan dengan Muangthai dan secara demikian dekat dengan Malaysia dan Singapura. Dengan menyerbu Vietnam, Cina mengungkapkan maksudnya untuk menggunakan kekerasan bila perlu. Tetapi seperti dikatakan lebih dahulu, Cina akan berusaha menjalin hubungan baik dengan ASEAN sambil bermusuhan dengan Vietnam. Dengan demikian dari sudut pandangan jangka pendek dan jangka menengah, Cina mungkin bukan ancaman militer bagi ASEAN. Tetapi dari perspektif jangka panjang tidak dapat disangkal bahwa suatu Cina yang diperkuat secara ekonomi dan militer bisa menjadi suatu ancaman militer yang besar sekali.

Dalam waktu dekat ini Cina kiranya tidak akan menjadi suatu ancaman militer bagi Pilipina dan Indonesia. Kapal-kapal selam Cina bisa merupakan ancaman tertentu, tetapi kemampuan Cina untuk melakukan invasi dengan operasi-operasi amfibi dan lintas udara dianggap kurang memadai bahkan untuk menghadapi Taiwan yang hanya 60 mil laut dari daratan Cina. Indonesia terletak pada jarak lebih dari 1.000 mil laut dari Cina dan jauh lebih besar daripada Taiwan. Sesuai dengan itu, maka ancaman Cina yang bisa menga-

cam Indonesia tidak bersifat militer tetapi bersifat politik seperti infiltrasi dan subversi atau secara konkrit munculnya kembali PKI berkat komplotan-komplotan Cina. Pemerintah Soeharto rupanya mampu sepenuhnya untuk menghentikan perkembangan serupa itu dengan memelihara keamanan dalam negeri.

JEPANG DAN ASIA TENGGARA

Jepang masih pasif dalam melakukan usaha-usaha pertahanan. Kendati desakan Amerika Serikat, anggaran pertahanan Jepang untuk tahun fiskal 1981 baru mencapai 0,91% GNP-nya. Baru-baru ini Jepang setuju dengan Amerika Serikat mengenai ancaman potensial kekuatan militer Uni Soviet di Timur Jauh dan adanya ketegangan sebagai akibatnya, tetapi masih terdapat perbedaan-perbedaan besar dalam persepsi mereka mengenai apa yang harus dilakukan.

Seperti diketahui, potensi militer Jepang bersifat defensif. Sekalipun banyak memikirkan untuk membela jalur-jalur laut vitalnya, termasuk Samudera Hindia, Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, Pasukan Bela-diri Maritim hanya mempunyai lingkup kegiatan yang terbatas. Pemerintah Jepang baru-baru ini mengukuhkan bahwa daerah operasi anti kapal selam merentang 1.000 mil laut ke jurusan Selatan dan Barat Daya dari Jepang, tetapi lingkup itu tidak mencapai Guam dan Pilipina Utara. Jalur-jalur laut Jepang adalah sangat panjang dan 1.000 mil laut itu hanya merupakan sebagian. Masalahnya ialah bagaimana melindungi bagian-bagian lainnya. Akan tetapi kalau pemerintah berusaha memperpanjang 1.000 mil itu, partai-partai oposisi akan menentang dengan keras dan mengatakan bahwa perpanjangan serupa itu akan merupakan suatu ancaman bagi negara-negara Asia Tenggara dan bahwa hal itu akan sama dengan mengirimkan pasukan ke luar negeri yang telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai bertentangan dengan konstitusi.

Kapal-kapal penyerang Uni Soviet yang berpangkalan di Wladiwostok harus melewati salah satu dari tiga selat - Soya, Tsugaru dan Tsushima - untuk menuju Pasifik Barat atau Samudera Hindia. Kalau dalam waktu perang Jepang sendiri atau Jepang dan Amerika Serikat dapat menutup lalu lintas kapal-kapal selam di tempat-tempat itu, hal ini akan banyak membantu melindungi jalur-jalur laut bagi Barat dan ASEAN.

Pemerintah Jepang mendukung gagasan "keamanan komprehensif". PM Suzuki menekankan filsafat ini pada pertemuan puncak bulan Juli yang lalu. Pemerintah menganggap ekonomi, diplomasi dan pertahanan sama-sama pen-

ting. Tetapi banyak orang Jepang tidak puas bahwa pemerintah memperkecil arti kemampuan pertahanan dengan kedok "keamanan komprehensif". Dalam konteks keamanan komprehensif, bantuan dan kerja sama ekonomi serta teknis dengan ASEAN akan dianggap sama-sama esensial seperti kemampuan pertahanan.

Bahwa anggaran pertahanan Jepang untuk tahun fiskal 1982 akan meningkat tidak lebih banyak dari 7.5% di atas tahun fiskal 1981 kini hampir merupakan suatu kepastian. Karena laju inflasi di Jepang rendah, jumlah alokasi pertahanan tahun fiskal 1982 mungkin tidak berkurang, namun peningkatan sebenarnya akan sangat kecil. Dalam kenyataan Pemerintah Jepang memberikan tingkat prioritas yang lebih tinggi kepada pertahanan daripada kepada lain-lain item pengeluaran, tetapi ketidakpuasan Amerika Serikat mengenai kurangnya usaha build-up pertahanan Jepang telah meningkat dan Eropa Barat juga menjadi semakin tidak puas dengan Jepang dalam konteks ofensif ekonomi Jepang di Eropa.

Pendapat sementara orang Jepang bahwa build-up militer Jepang akan merupakan suatu ancaman bagi Asia Tenggara baru-baru ini surut. Bahkan kalau pengeluaran pertahanan Jepang melebihi 1% dari GNP, sulit dibayangkan bahwa Jepang akan kembali ke militerisme dan ekspansionisme. Juga tidaklah mungkin meramalkan kapan angka 1% itu akan dicapai.

Sementara orang Amerika Serikat memikirkan suatu Organisasi Perjanjian Keamanan Pasifik Barat yang meliputi Asia Timur Laut, Asia Tenggara dan Oseania, tetapi konsep ini tidak akan dapat diterima oleh Jepang dalam waktu dekat ini. Tidak sedikit orang Jepang yang mempunyai gagasan egoistis bahwa, sekalipun orang harus membela tanah airnya, menjadi anggota suatu sistem keamanan kolektif merupakan suatu pelanggaran konstitusi dan akan meningkatkan bahaya Jepang terlibat dalam perang.

Harus dikemukakan di sini bahwa Partai Sosialis Jepang, partai oposisi yang paling besar, dan Partai Komunis Jepang, partai terbesar keempat, memperjuangkan pembatalan Perjanjian Keamanan Jepang-Amerika Serikat dan pembubaran pasukan bela diri. Akan tetapi dalam kenyataan keamanan dalam negeri dipelihara cukup baik dan pengaruh partai-partai oposisi ini dan sekutu-sekutu mereka sedikit menurun.

Orang-orang Jepang menyadari bahwa keamanan Asia Tenggara erat terjalin dengan keamanan Jepang. Jepang akan terus berusaha, sebagai salah satu kebijaksanaan prioritas, memajukan kerja sama politik dan ekonomi dengan ASEAN, termasuk usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah Kam-puchea.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa majalah dan buku-buku:

ANALISA

terbitan berkala, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Termasuk dalam seri ini adalah MONOGRAF yang membahas satu analisa tertentu. Harga per eks Rp. 500,— langganan setahun (12 nomor) Rp. 6.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 4.800,—

THE INDONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulan, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp. 800,—, langganan setahun (4 nomor) Rp. 3.200,—

BUKU—BUKU

hasil penulisan staf CSIS baik mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:

BIRO PUBLIKASI — CSIS

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat Telepon 349489

Untuk menunjang kegiatan pengkajian CSIS juga menyediakan PER-PUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN CSIS dan BIRO INFORMASI DAN DATA CSIS

Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Telepon 356532-5

